

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT*
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SULAWESI
SELATAN**

TESIS

**Oleh:
Moses Siburian
2013831032**

**Pembimbing:
Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc.**



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
JANUARI 2017**



HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT* BIDANG JALAN
DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM & PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SULAWESI SELATAN**

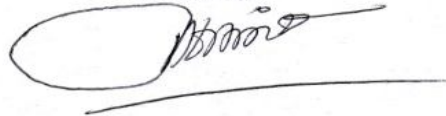
Oleh:

**Moses Siburian
2013831032**

Disetujui Untuk Ujian Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:

Kamis, 12 Januari 2017

Pembimbing:



Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc.



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
JANUARI 2017**



**EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT*
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN
RAKYAT PROPINSI SULAWESI SELATAN**

TESIS

Moses Siburian

2013831032

PERSETUJUAN TESIS

Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc
Pembimbing Tunggal/Penguji



Ir. Yohanes Lim Dwi Adianto, MT
Penguji



Amir Hamzah, ST, MT
Penguji



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
JANUARI 2017**





PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Moses Siburian
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013831032
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi Program
Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

“EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT* BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SULAWESI SELATAN”

adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat,dan/atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 12 Januari 2017



Moses Siburian



EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT* BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SULAWESI SELATAN

Moses Siburian (NPM: 2013831032)
Pembimbing: Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc
Magister Teknik Sipil
Bandung
Januari 2017

ABSTRAK

Multitafsir, persekongkolan dan kesalahan dalam evaluasi yang berujung pada kegagalan proyek masih sering terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam bidang konstruksi. Untuk menangani hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelelangan secara elektronik. Penelitian dilakukan dalam pelelangan jalan dan jembatan secara *e-Procurement* di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Persepsi dikumpulkan dari responden Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa jalan dan jembatan pada TA 2013 sampai 2015. Pelaksanaan sistem *e-Procurement* menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya memenuhi predikat sebagai sistem pelelangan elektronik. Dari TA 2013 sampai 2015, masing-masing terdapat 8 indikator dan 5 indikator pelaksanaan pelelangan dengan kategori buruk menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Penilaian dengan tren menurun menurut Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa terutama terjadi pada indikator IV.2 'Kegiatan pemantauan cukup melalui portal pelelangan LKPP'. Sementara itu, perbedaan persepsi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menilai pelaksanaan pelelangan dalam TA 2013 sampai 2015 memiliki tren menurun. Hal ini merupakan kondisi yang positif mengingat kedua responden yang berperan dalam pelelangan diharapkan memiliki persepsi yang sama. Berdasarkan perhitungan indeks kesuksesan pada TA 2015, menurut Pengguna Jasa tidak ada variabel pelaksanaan pelelangan yang dapat dikatakan sukses. Sementara itu, menurut penyedia Jasa hanya variabel VI 'Tingkat interoperabilitas dalam bertransaksi' yang dapat dikatakan sukses dalam pelaksanaan pelelangan.

Kata Kunci: *e-Procurement*, pelaksanaan pelelangan, skala Likert

**EVALUATION OF E-PROCUREMENT SYSTEM IMPLEMENTATION
OF ROADS AND BRIDGES PROJECT IN MINISTRY OF PUBLIC
WORKS & HOUSING SOUTH SULAWESI PROVINCE**

Moses Siburian (NPM: 2013831032)
Adviser: Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc
Magister of Civil Engineering
Bandung
2017, January

ABSTRACT

Multiple interpretations, conspiracy and poor evaluation that led to the failure of the project still common in the procurement of government goods / services, especially in the construction field. To handle this, need to do the evaluation in the implementation of the electronic procurement. The study was conducted in the procurement of roads and bridges projects in Regional Office for The Implementation of The National Roads VI Makassar South Sulawesi Province. Perceptions gathered from respondents such as tender committee and contractors of roads and bridges projects in year 2013 to 2015. Implementation of e-Procurement system according to User dan Service Provider were in good condition but not fully satisfy the predicate as an electronic procurement system. From year 2013 to 2015, there are eight indicators and five indicators of procurement implementation with bad categories according to the Service User and Service Provider. Ratings with a downward trend according to Users and Service Providers mainly in IV.2 indicators 'monitoring activities were sufficient through LKPP procurement portal'. Meanwhile, the difference perception between User dan Service Provider in assessing procurement implementation in year 2013 to 2015 had downward trend. This is a positive condition considering both respondents that play a role in the procurement is expected to have the same perception. Based on the calculation of success index in year 2015, according to Users, there is no variables that can be said a successful n the procurement implementation. Meanwhile, according to the Service Provider only variable VI 'level of interoperability in the transaction' which can be said to be successful in the procurement implementation.

Keyword: *e-Procurement, procurement implementation, Likert scale*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN SISTEM *E-PROCUREMENT* BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SULAWESI SELATAN”**. Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi penilaian untuk mata kuliah Tesis. Pada proses penyusunan penelitian ini penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, dorongan dan bimbingan yang sangat membantu penulis. Maka dari itu pada kesempatan yang bahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Anton Soekiman, Ir., MT, M.Sc sebagai pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini sampai dengan tesis ini selesai.
2. Keluargaku Kak Uli, Praja, Lae Domo yang terus memberi dukungan dan semangat.
3. Teman-teman kelompok kerja pengadaan barang/jasa propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
4. Rekan-rekan karyasiswa Magister Manajemen Proyek Konstruksi 2013.
5. Dosen-dosen di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan dan segenap dosen dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.

6. Dan kepada semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya

Tiada sesuatu yang sempurna, demikian pula tesis ini. Kritik positif dan membangun untuk kesempurnaan tesis ini merupakan kehormatan penulis.

Bandung , Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
PERSETUJUAN TESIS	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1. Tujuan	5
1.3.2. Manfaat	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah.....	9

2.2.	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12
2.3.	Penerapan Pelelangan di Singapura dan Australia.....	15
2.4.	<i>Electronic Procurement</i>	21
2.4.1.	<i>e-Procurement</i> sebagai pengganti lelang konvensional.....	21
2.4.2.	Kekuatan Hukum Pelelangan dengan Sistem <i>e-Procurement</i>	23
2.4.3.	Kebutuhan Keamanan dalam Transaksi <i>e-Procurement</i>	25
2.4.4.	<i>e-Procurement</i> yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.....	27
2.5.	Prosedur pengadaan konstruksi pemerintah	29
2.6.	Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan konstruksi	34
2.7.	Evaluasi Pelelangan dalam Pekerjaan Konstruksi	37
2.7.1.	Pengertian Evaluasi.....	37
2.7.2.	Mekanisme Evaluasi	40
2.7.3.	Kriteria Evaluasi Pelelangan	41
2.8.	Faktor Penilaian dalam Evaluasi Pelelangan.....	43
2.9.	Statistik dalam Penelitian	43
2.9.1.	Teknik Pengujian Validitas dan Reliabilitas	44
2.9.2.	Uji Normalitas	46
2.9.3.	Teknik Analisis Data.....	47
2.9.4.	Analisis Beda dalam Statistik.....	48
2.10.	Perkembangan Penelitian mengenai Pelelangan Pekerjaan Konstruksi.....	50
BAB 3 METODE KAJIAN.....		63
3.1.	Umum.....	63
3.2.	Perumusan Variabel	65

3.3.	Perumusan Indikator Penilaian.....	68
3.4.	Deskripsi Masing-Masing Indikator Penilaian.....	82
3.5.	Pengembangan Instrumen Penelitian.....	92
3.6.	Pengujian Item Instrumen	94
3.7.	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	96
3.8.	Penentuan Responden	98
3.9.	Analisis Hasil dan Pembahasan.....	100
3.9.1.	Uji Normalitas	100
3.9.2.	Pemeringkatan indikator pelaksanaan sistem <i>e-Procurement</i> berdasarkan fakta lapangan.....	101
3.9.4.	Pemeringkatan indikator pelaksanaan sistem <i>e-Procurement</i> berdasarkan tingkat kepentingan.....	103
3.9.5.	Beda Persepsi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.....	105
3.10.	Kesimpulan dan Rekomendasi	106
BAB 4 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....		107
4.1.	Gambaran Umum Wilayah Studi.....	107
4.2.	Validitas dan Reliabilitas Responden	109
4.3.	Pengumpulan Data.....	112
4.4.	Karakteristik Responden	113
4.4.1.	Responden Pengguna Jasa	114
4.4.2.	Responden Pengguna Jasa	117
4.5.	Bagan Alir Proses Evaluasi Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik.....	119
4.6.	Uji Normalitas	122

4.7.	Pemeringkatan Berdasarkan Fakta Lapangan dalam Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik	123
4.7.1.	Penilaian Pengguna Jasa terhadap Pelaksanaan Pelelangan	125
4.7.2.	Penilaian Penyedia Jasa terhadap Pelaksanaan Pelelangan.....	138
4.8.	Pemeringkatan Berdasarkan Tingkat Kepentingan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik	147
4.9.	Perbedaan Persepsi antara Pegawai ULP dan Kontraktor	153
4.9.1.	Perbedaan Persepsi Berdasarkan Tingkat Pelaksanaan Pelelangan	153
4.9.2.	Perbedaan Persepsi Berdasarkan Tingkat Kepentingan.....	160
4.9.3.	Perbedaan Persepsi Berdasarkan Tahun Anggaran Pelelangan...	163
4.10.	Evaluasi Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik	166
4.10.1.	Analisis Indeks Kesuksesan Pelaksanaan Pelelangan menurut Pengguna Jasa/Pegawai ULP	166
4.10.2.	Analisis Indeks Kesuksesan Pelaksanaan Pelelangan menurut Penyedia Jasa/Kontraktor.....	170
4.11.	Langkah strategis untuk Peningkatan Pelaksanaan Pelelangan secara Elektronik.....	173
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		187
5.1.	Kesimpulan.....	187
5.2.	Saran.....	191
DAFTAR PUSTAKA		193

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sejarah Perubahan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010	10
Gambar 2.2	Turunan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010.....	11
Gambar 2.3	Prosedur Pelelangan Konstruksi di Singapura	18
Gambar 2.4	Prosedur Pelelangan Pekerjaan konstruksi di ACT	21
Gambar 2.5	Sejarah Perkembangan Proses Pengadaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	22
Gambar 2.6	Jenis Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	27
Gambar 2.7	Garis Penugasan antara Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan secara <i>e-Procurement</i>	35
Gambar 2.8	Sirkulasi Data dalam <i>e-Procurement</i>	37
Gambar 2.9	Kronologis Penelitian dengan Topik Pelelangan Pekerjaan Konstruksi	50
Gambar 3.1	Tahapan Penelitian	64
Gambar 3.2	Skala <i>Likert</i> untuk Skor Penilaian Kinerja Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi	103
Gambar 3.3	Skala <i>Likert</i> untuk Skor Tingkat Kepentingan Masing-Masing Variabel Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi	104
Gambar 4.1	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Perusahaan Penyedia Jasa dan Instansi Pengguna Jasa.....	114

Gambar 4.2	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Pengguna Jasa menurut Kedudukan dalam Organisasi.....	115
Gambar 4.3	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Pengguna Jasa menurut Pengalaman	116
Gambar 4.4	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Pengguna Jasa menurut Tingkat Pendidikan.....	116
Gambar 4.5	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Penyedia Jasa menurut Kedudukan dalam Organisasi.....	117
Gambar 4.6	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Penyedia Jasa menurut Pengalaman	118
Gambar 4.7	<i>Pie Chart</i> Persentase Responden Penyedia Jasa menurut Tingkat Pendidikan.....	118
Gambar 4.8	Bagan Alir Evaluasi Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik	121
Gambar 4.9	Skala <i>Likert</i> untuk Skor Penilaian Indikator IV.2 Kinerja Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi.....	124
Gambar 4.10	Grafik Perubahan Nilai Variabel Pelaksanaan Pelelangan menurut Pengguna Jasa pada TA 2013 sampai 2015	126
Gambar 4.11	Grafik Indikator dengan Penilaian Buruk dan Sangat Buruk menurut Pengguna Jasa pada TA 2013 sampai 2015 dengan (a) Tren Meningkat dan (b) Tren Menurun	130
Gambar 4.12	Grafik Perubahan Nilai Variabel Pelaksanaan Pelelangan menurut Penyedia Jasa pada TA 2013 sampai 2015.....	139

Gambar 4.13	Grafik Indikator dengan Penilaian Buruk dan Sangat Buruk menurut Penyedia Jasa pada TA 2013 sampai 2015 dengan (a) Tren Meningkat dan (b) Tren Menurun.....	143
Gambar 4.14	Skala <i>Likert</i> untuk Skor Tingkat Kepentingan Indikator IV1.b Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi	148
Gambar 4.15	Grafik Tingkat Kepentingan Variabel Pelaksanaan Pelelangan menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.....	149
Gambar 4.16	Indeks Kesuksesan Variabel Pelaksanaan Pelelangan Menurut Pengguna Jasa dalam Tahun Anggaran 2013 sampai 2015	167
Gambar 4.17	Indeks Kesuksesan Variable Pelaksanaan Pelelangan Menurut Penyedia Jasa dalam Tahun Anggaran 2013 sampai 2015	170



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Paket, Jumlah Sanggahan dan Jangka Waktu Pengadaan dalam Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan untuk Lima Propinsi Besar di Indonesia TA 2013-2015	2
Tabel 2.1	Metode yang Berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia	12
Tabel 2.2	Prosedur Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul dengan Metode Sistem Gugur	32
Tabel 2.3	Perbedaan Monitoring dan Evaluasi	38
Tabel 2.4	Jenis Analisis Beda beserta Karakteristik Data	45
Tabel 2.5	Jawaban atas Pertanyaan atau Pernyataan dalam Skala <i>Likert</i>	48
Tabel 2.6	Jenis Analisis Beda Beserta Karakteristik Data	49
Tabel 2.7	Faktor Penggerak dan Faktor Kendala yang Terjadi dalam Pelelangan Pekerjaan konstruksi secara <i>e-Procurement</i> Bidang <i>Roads Service Northern Ireland (RSNI)</i>	53
Tabel 2.8	Faktor – Faktor yang Terjadi dalam Penerapan <i>e-business</i> di bidang <i>Architctural, Engineering and Construction (AEC)</i> di Kanada	54
Tabel 2.9	Keuntungan dan Permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik Berbasis <i>Web</i> di Inggris Raya	55
Tabel 2.10	Faktor Penggerak dan Faktor Kendala yang Terjadi dalam Industri Konstruksi di Inggris Raya.....	56

Tabel 2.11	Faktor Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> di Banda Aceh	58
Tabel 2.12	Faktor Kendala yang Terjadi dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i> di Banda Aceh	60
Tabel 2.13	Permasalahan dalam penerapan <i>e-Procurement</i> di Afrika Selatan	61
Tabel 3.1	Proses Seleksi Indikator yang Digunakan untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Pelelangan dalam Pekerjaan Konstruksi	69
Tabel 3.2	Proses Seleksi Tahap Kedua Indikator Penilaian dalam Evaluasi Pelelangan	80
Tabel 3.3	Gambaran Jumlah Penyedia Jasa dalam bidang Jalan dan Jembatan di Propinsi Sulawesi Selatan.....	99
Tabel 3.4	Nilai Interpretasi Skala <i>Likert</i> untuk Penilaian dan Pendapat Responden Mengenai Indikator Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi.....	102
Tabel 3.5	Nilai Interpretasi Skala <i>Likert</i> untuk Penilaian dan Pendapat Responden Mengenai Indikator Pelelangan Secara Elektronik dalam Pekerjaan Konstruksi.....	104
Tabel 4.1	Detail Jumlah Responden Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa	108
Tabel 4.2	Varian Skor Tiap Item Pertanyaan	110
Tabel 4.3	Jumlah Total Skor dan Jumlah Kuadrat Total Skor Masing-Masing Responden.....	111
Tabel 4.4	Data Pengumpulan Kuesioner dari Responden	113
Tabel 4.5	Uji Normalitas untuk Responden Pengguna Jasa	122

Tabel 4.6	Uji Normalitas untuk Responden Penyedia Jasa.....	122
Tabel 4.7	Penilaian Variabel Pelaksanaan Pelelangan menurut Pengguna Jasa pada TA 2013 sampai 2015	125
Tabel 4.8	Peringkat Penilaian Indikator Pelaksanaan Pelelangan menurut Pengguna Jasa pada TA 2013 sampai 2015	128
Tabel 4.9	Penilaian Variabel Berdasarkan Tingkat Kinerja Pelaksanaan Pelelangan menurut Penyedia Jasa pada TA 2013 sampai 2015	138
Tabel 4.10	Peringkat Penilaian Indikator Pelaksanaan Pelelangan menurut Penyedia Jasa pada TA 2013 sampai 2015	141
Tabel 4.11	Peringkat Variabel Berdasarkan Tingkat Kepentingan menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.....	148
Tabel 4.12	Rekapitulasi Perhitungan Peringkat Indikator Berdasarkan Tingkat Kepentingan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik	150
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Beda Persepsi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Pelelangan Menggunakan Uji <i>t-test</i>	154
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Beda Persepsi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Berdasarkan Tingkat Kepentingan Menggunakan Uji <i>t-test</i>	160
Tabel 4.15	Hasil Pengujian Beda Persepsi Berdasarkan Tahun Anggaran menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Menggunakan Uji <i>ANOVA</i>	164
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Indeks Kesuksesan Indikator menurut Pengguna Jasa/Pegawai ULP	167

Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Indeks Kesuksesan Menurut Penyedia Jasa/Kontraktor	171
Tabel 4.18	Rekapitulasi Penilaian dan Uji terhadap Pelaksanaan Pellenagan Secara Elektronik sebagai dasar Evaluasi	173
Tabel 4.19	Usulan Langkah Strategi Peningkatan terhadap Indikator Pelaksanaan Pelelangan secara Elektronik.....	184



DAFTAR LAMPIRAN

- L1 : TUGAS DAN WEWENANG PARA PERSONIL PELELANGAN
- L2 : KUESIONER PENELITIAN
- L3 : PERHITUNGAN REABILITAS
- L4 : REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN
- L5 : UJI NORMALITAS UNTUK KELOMPOK DATA PENGGUNA JASA
DAN PENYEDIA JASA
- L6 : REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN *FREQUENCY INDEX*
TERHADAP PENILAIAN PELAKSANAAN PELELANGAN DAN
TINGKAT KEPENTINGAN
- L7 : HASIL PENGUJIAN PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA
PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA
- L8 : HASIL PENGUJIAN PERBEDAAN PERSEPSI BERDASARKAN
TAHUN ANGGARAN



DAFTAR SINGKATAN

ACRA	: <i>Accounting & Corporate Regulatory Authority</i>
ACT	: <i>Australian Capital Territory</i>
AEC	: <i>Architctural, Engineering and Construction</i>
ATM	: <i>Approach To Market</i>
BCA	: <i>Building and Construction Authority</i>
CPRs	: <i>Commonwealth Procurement Rules</i>
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
LPSE	: Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
LTA	: <i>Land Transport Authority</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	: Peraturan Presiden
<i>PQM</i>	: <i>Price Quality Method</i>
PUPR	: Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
<i>QFM</i>	: <i>Quality Fee Method</i>
RSNI	: Roads Service Northern Ireland
RICS	: <i>Royal Institution of Chartered Surveyors</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDP	: Standar Dokumen Pengadaan
SiKAP	: Sistem Informasi Kinerja Penyedia

TPA : *Traditional Procurement Approach*

ULP : Unit Layanan Pengadaan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengadaan barang/jasa konstruksi agar sejalan dengan standar dunia. Salah satu solusi terkini dan paling mendasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengadaannya adalah penerapan sistem *e-Procurement*. Agus Prabowo selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menyebutkan bahwa *e-Procurement* itu pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga otomatis penyalahgunaan akan berkurang¹.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan pelelangan pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem *e-Procurement*. Sebagian besar metode pelelangan untuk pekerjaan konstruksi tersebut menggunakan pelelangan umum dengan pascakualifikasi satu sampul sistem gugur. Pelelangan dengan metode ini memiliki porsi sebesar 97.2% dari keseluruhan paket jalan dan jembatan di lima propinsi besar mulai tahun anggaran 2013-2015². Dalam pelaksanaannya yang

¹ Majalah Pengadaan Indonesia Kredibel Edisi 01 bulan Oktober 2011 – Desember 2011

² www.pu.go.id. 'Portal Full e-Procurement Kementerian PUPR'. Diakses tanggal 10 Oktober 2015

telah berlangsung beberapa tahun, pelelangan dengan metode ini ternyata masih bermasalah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Paket, Jumlah Sanggahan dan Jangka Waktu Pengadaan dalam Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan untuk Lima Propinsi Besar di Indonesia TA 2013-2015

Propinsi	DKI Jakarta	Jawa Timur	Sumatra Utara	Sulawesi Selatan	Kalimantan Timur
Paket	58	127	143	93	200
Sanggahan	6	14	69	6	41
Rerata Jangka waktu pengadaan (Bulan)	3.2	2.7	2.3	2.9	2.8

(Sumber: Portal Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)

Sanggahan yang muncul terutama di propinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Timur merupakan indikasi bahwa masih ada aspek yang kurang diperhatikan atau bahkan belum disentuh oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan pelelangan. Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan juga turut mempengaruhi kualitas hasil pelelangan. *e-Procurement* dalam pelelangan pekerjaan konstruksi selama ini lebih mengakomodasi aspek transparan, terbuka dan bersaing dalam hal pengumuman bukan efisiensi dalam tata laksana lelang yang lebih teliti.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, Wang *et al.* (2014) menilai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem *e-Procurement* yang telah diterapkan di berbagai negara masih belum mampu mengatasi ketidakjelasan, ketidakpastian dan ketidaklengkapan informasi para peserta lelang. *Building and Construction Authority* (BCA) menyebutkan prinsip kunci metode evaluasi harga dan kualitas (*Price Quality Method*) di negara Singapura adalah *value for money* dimana dalam evaluasi harga penawaran, produktifitas dan kualitas harus menggunakan pembobotan dan *scoring* yang telah disepakati³. Kebanyakan faktor

³ <http://www.bca.gov.sg>, "Buiding And Construction Authority", diakses tanggal 18 Nopember 2015

evaluasi paket pekerjaan konstruksi di Indonesia belum memiliki acuan penilaian yang baku, selain itu tidak ada penilaian terhadap penyedia jasa yang memiliki potensi lebih pada beberapa faktor evaluasi.

Selain itu, kemampuan suatu organisasi dalam menerapkan *e-Procurement* bukan dilihat dari pengetahuan teknologi yang dimiliki sumber daya manusianya namun kepatuhan sumber daya manusia tersebut terhadap pelelangan yang bersih dan sesuai regulasi. Lou *et al.* (2009) yang menyebutkan bahwa dalam lingkungan yang mendukung, proses pelelangan pekerjaan konstruksi secara konvensional tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan secara *e-Tendering* dalam hal permasalahan sumber daya manusia maupun proses pelelangannya.

Fenomena ini pada akhirnya berimplikasi pada perbuatan melanggar hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang membuat pihak yang terlibat dalam pelelangan menjadi enggan melaksanakan fungsinya. Faisol (2014) yang menyebutkan bahwa tahap-tahap pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan. Terdapat beberapa tahap pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan pengadaan.

Program percepatan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah menuntut pelaksanaan pelelangan di bidang pekerjaan konstruksi yang lebih cepat dan tepat dalam menetapkan pemenang. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap p pelelangan pekerjaan konstruksi secara *e-Procurement* yang berlaku sekarang. Tanpa adanya evaluasi, sulit untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pelaksanaan pelelangan telah tercapai.

Hasil evaluasi ini dapat menentukan arah pengembangan pelelangan pekerjaan konstruksi agar dapat sejalan dengan program infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Penerapan pelelangan dibidang pekerjaan konstruksi telah mengalami banyak kemajuan terutama dalam menekan kerugian negara maupun penyimpangan akibat persekongkolan & multitafsir yang terjadi dalam pelelangan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan mendasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pengaplikasian sistem *e-Procurement* khususnya dalam organisasi Kementerian PUPR.

Namun dengan segala kelebihananya, pelaksanaan pelelangan secara elektronik tersebut bukan tanpa hambatan. Hambatan-hambatan yang ada berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang menimpa para pelaku pelelangan. Sehingga untuk mengatasi persoalan itu, perlu diketahui sudah sampai mana pelelangan secara elektronik diterapkan dan bagaimana sikap para pelaku pelelangan terhadap pelelangan tersebut. Dengan kata lain, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelelangan pekerjaan konstruksi dengan sistem *e-Procurement* dalam beberapa tahun terakhir. Parameter evaluasi yang digunakan dapat berupa kesesuaian dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan aspek-aspek pelelangan secara elektronik. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan strategis yang tepat sasaran sebagai upaya peningkatan pelelangan dalam bidang pekerjaan konstruksi.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

1. Mengidentifikasi faktor-faktor dalam penilaian kinerja pelelangan pekerjaan konstruksi bidang jalan dan jembatan di Kementerian PUPR,
2. Mengetahui tingkat kepentingan dari setiap faktor penilaian kinerja pelelangan pekerjaan konstruksi bidang jalan dan jembatan di Kementerian PUPR,
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelelangan pekerjaan konstruksi bidang jalan dan jembatan dari sisi pengguna jasa dan penyedia jasa,
4. Mengusulkan langkah strategis untuk peningkatan pelelangan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR.

1.3.2. Manfaat

1. Memberikan alternatif baru dalam pengembangan pelelangan pekerjaan konstruksi,
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan sistem *e-Procurement* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat khususnya di bidang jalan dan jembatan propinsi Sulawesi Selatan

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh:

- Fokus pada pelelangan pekerjaan konstruksi yang berlaku dalam Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar di propinsi Sulawesi Selatan.

- Responden dalam penelitian ini antara lain pengguna jasa dan penyedia jasa di wilayah kerja propinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.

1.4. Metode Penelitian

Secara umum, proses penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

a. Studi Literatur

Untuk mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, landasan teori/acuan dan permasalahan awal.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para pemegang kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengguna Jasa yang mengikuti pelelangan. Penyebaran kuesioner ini dimaksudkan untuk mencari tahu tingkat preferensi responden dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi pemerintah yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui studi literatur.

c. Analisis Data dan Pembahasan

Respon terhadap kuesioner yang didapat dari para responden kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Hasil analisis dan evaluasi ini akan digunakan dalam menentukan strategi dalam peningkatan pelaksanaan pengadaan konstruksi pemerintah kedepannya.

d. Perumusan usulan strategis dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi pemerintah

Hasil analisis dan pembahasan selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam merumuskan strategi penerapan solusi dari aspek-aspek permasalahan tersebut. Strategi ini berbentuk tahapan-tahapan penerapan yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

e. Kesimpulan

Melalui hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang menjawab tujuan dari penulisan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Berisi kajian pustaka yang relevan dan terkait dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dari berbagai riset akan dibahas untuk mengetahui aspek apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan konstruksi pemerintah khususnya yang berlaku dalam konstruksi jalan & jembatan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Kajian yang akan dibahas antara lain mengenai aspek dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dasar hukum dan metode pelaksanaan pengadaan konstruksi di beberapa negara, tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Procurement* di Kementerian Pekerjaan Umum

& Perumahan Rakyat (PUPR), permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan riset-riset terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Berisi alur pelaksanaan penelitian secara umum. Tahapannya berupa studi literatur, pengumpulan data dan analisis data, pembahasan hasil analisa dan perumusan strategis sampai kesimpulan dan saran.

BAB IV Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari responden dianalisis dalam bab ini. Keluaran dari analisis data akan dibahas sesuai dengan studi literatur dan tinjauan teori yang telah dibahas sebelumnya. Hasil analisis dari data tersebut merupakan dasar dari perumusan strategi.

BAB V Pembahasan Hasil Analisis dan Perumusan Strategi

Hasil perhitungan data berupa peringkat prioritas dan bobot masing-masing indikator penilaian akan dianalisis melalui beberapa pembahasan. Kemudian hasil pembahasan tersebut digunakan untuk menyusun suatu strategi dalam pengembangan pelaksanaan pengadaan konstruksi dengan menggunakan sistem *e-Procurement*.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut disertai saran yang dianggap perlu dilakukan untuk kesempurnaan penelitian berikutnya.